****

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KOTA PONTIANAK**

**TAHUN 2024-2026**

**KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan, strategi kebijakan dan program Badan Kesbangpol, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2024 -2026 harus di ketahui, di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistemantis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran Kesbangpol. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Badan Kesbangpol Kota Pontianak harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang operasional dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian RENSTRA Perubahan Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah–langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan Kesbangpol kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Kesbangpol dapat memanfaatkan RENSTRA ini sabagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

* 1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
    1. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

* 1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur

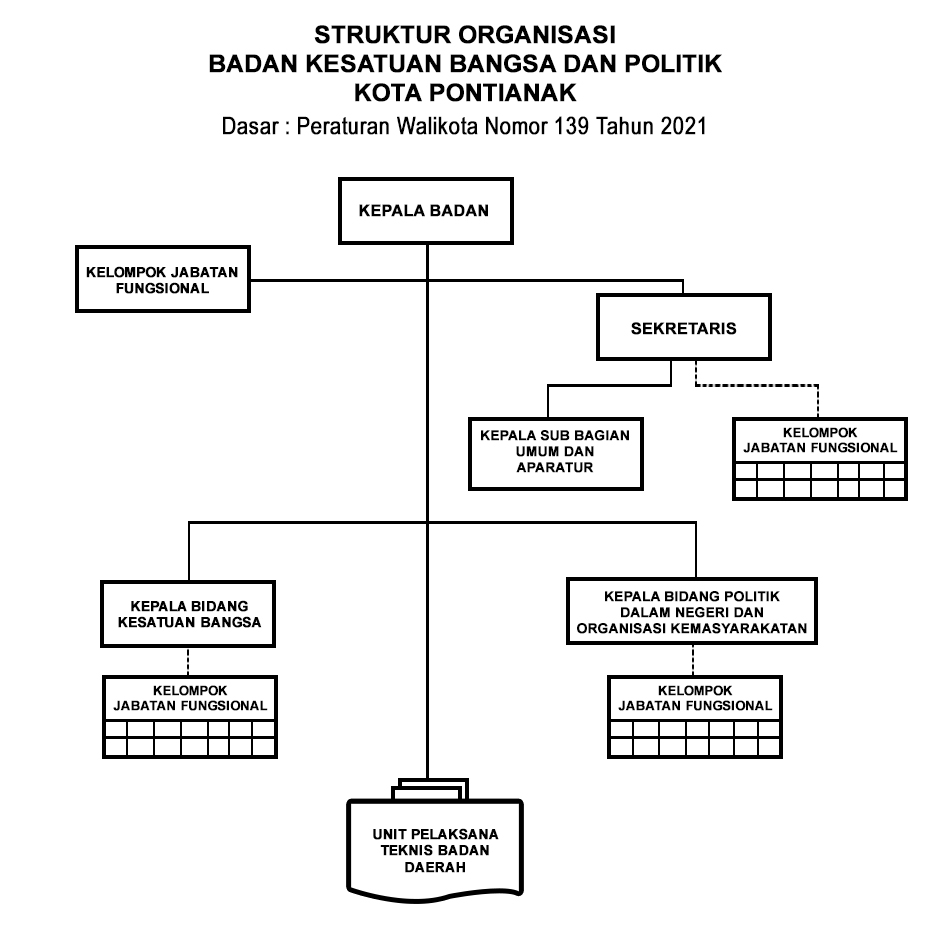
Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Pontianak melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, maka ditetapkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Pontianak mempunyai tugas pokok : **“Membantu Wali Kota Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”.**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini:

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja** **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**



* 1. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Badan Kesbangpol Kota Pontianak memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Daftar Nominatif Pegawai**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pendidikan | Kepala  Badan | | Sekretaris  Badan | | Tata Usaha | | Bidang Kesatuan Bangsa | | Bidang Politik | | Jumlah | | Total | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | SMA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | D3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | S1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | | S2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | Jumlah | - | - | - | - | 0 | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 | 10 | | Total | 1 | | 1 | | 4 | | 2 | | 2 | | 10 | |  | |

Dilihat dari segi pendidikan menurut tabel terbaca bahwa 80% tingkat pendidikan berijazah sarjana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak namun perlu didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kinerja. Sedangkan untuk pengisian pegawai pada jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Jumlah Jabatan Terisi Dan Lowong**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JABATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1. | Kepala Badan | 1 orang | Terisi |
| 2. | Sekretasis Badan | 1 orang | Terisi |
| 3. | Analis Perencanaan | - | Lowong |
| 4. | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | - | Lowong |
| 5. | Penata Laporan Keuangan | - | Lowong |
| 6. | Verifikator Data Laporan Keuangan | 1 orang | Terisi |
| 7. | Bendahara | 1 orang | Terisi |
| 8. | Pengelola Keuangan | - | Lowong |
| 9. | Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan | - | Lowong |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur | 1 orang | Terisi |
| 11. | Analis Kebijakan | - | Lowong |
| 12. | Pengadministrasian Umum | 1 orang | Terisi |
| 13. | Pengelola Kepegawaian | - | Lowong |
| 14. | Pranata Kearsipan | - | Lowong |
| 15. | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | - | Lowong |
| 16. | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | - | Lowong |
| 17. | Pengelola Data | - | Lowong |
| 18. | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa | 1 orang | Terisi |
| 19. | Analis Wawasan Kebangsaan | 1 orang | Terisi |
| 20. | Pengelola Data | - | Lowong |
| 21. | Analis Kebijakan | - | Lowong |
| 22. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | 1 orang | Terisi |
| 23. | Analis Masalah Sosial | 1 orang | Terisi |
| 24. | Analis Partai Politik | - | Lowong |
| 25. | Analis Kebijakan | - | Lowong |

**Kualifikasi Pegawai Badan Kesbangpol**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **JUMLAH** |
| 1. | Eselon II | 1 Orang |
| 2. | Eselon III | 3 orang |
| 3. | Eselon IV | 1 orang |
| 4. | Fungsional | - |
| 5. | Pelaksana (Staf) | 5 orang |
| 6. | Pegawai Non ASN | 6 orang |

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah pegawai eselon II terisi yaitu Kepala Badan, eselon III sebanyak 3 orang yaitu Sekretaris Badan dan Kepala Bidang, eselon IV sebanyak 1 orang yaitu Kasubag Umum dan Aparatur. Dari pejabat eselonering tersebut yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan ditunjukan pada tabel berikut.

**Tabel Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PELATIHAN PENJENJANGAN** | **JUMLAH** |
| 1. | Diklat PIM III | 3 |
| 2. | Diklat PIM IV | 6 |

a Data tersebut menunjukan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan atau kepemimpinan yaitu PIM III hanya 3 orang yaitu Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Analisis Wawasan Kebangsaan serta PIM IV sebanyak 5 orang yaitu Kepala Badan, Sekretaris Badan, Analis Wawasan Kebangsaan, Kasubbag Umum dan Aparatur, Kabid Kesatuan Bangsa dan Kabid Poldagri dan Ormas.

* 1. Kinerja Pelayanan

1. **Bidang Poldagri dan Organisasi Masyarakat**

Kepala Bidang Poldagri dan Ormas memiliki tugas yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Pontianak. Adapun dimensi kegiatannya meliputi :

1. **Partai Politik**

Partai politik di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mana keberadaan partai politik ini menunjukkan proses demokrasi di Indonesia dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Adapun jumlah Partai Politik yang ada di Kota Pontianak yaitu :

**Tabel Jumlah Partai Politik Dan Dana Bantuan Keuangan Di Kota Pontianak Dan Memiliki Kursi Di Dprd Kota Pontianak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik Kota Pontianak** | **Kursi** | **Suara Sah** | **Besarnya Bantuan Keuangan a 5000 ( Rp )** | **Besarnya Bantuan Keuangan a 10.000 (Rp)** |
| 1. | DPC.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6 | 46.299 | 231.495.000 | 462.990.000 |
| 2. | DPD. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 6 | 45.205 | 226.025.000 | 452.050.000 |
| 3. | DPD. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 6 | 40.595 | 202.975.000 | 405.950.000 |
| 4. | DPD. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 33.831 | 169.155.000 | 338.310.000 |
| 5. | DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3 | 26.952 | 134.760.000 | 269.520.000 |
| 6. | DPC. Partai Amanat Nasional (PAN) | 3 | 24.234 | 121.170.000 | 242.340.000 |
| 7. | DPD. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 3 | 24.112 | 120.560.000 | 241.120.000 |
| 8. | DPC. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 4 | 23.738 | 118.690.000 | 237.380.000 |
| 9. | DPC. Partai Golongan Karya (Golkar) | 3 | 23.729 | 118.645.000 | 237.290.000 |
| 10. | DPK. Partai Demokrat (PD) | 3 | 17.763 | 88.815.000 | 177.630.000 |
| 11. | DPC.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 2 | 14.962 | 74.810.000 | 149.620.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | DPC. Partai Bulan Bintang (PBB) | 1 | 10.039 | 50.195.000 | 100.390.000 |
| J u m l a h | | 45 | 331.459 | 1.657.295.000 | 3.314.590.000 |

**Tabel Partai Politik Yang Tidak Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Pontianak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik Kota Pontianak** | **Suara Sah** |
| 1. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 8.303 |
| 2. | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) | 2.094 |
| 3. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 23.738 |
| 4. | Partai Beringin Karya (Berkarya) | 3.526 |
| 5. | Partai Ummat | 0 |
| 6. | Partai Buruh | 0 |
| 7. | Partai Garuda | 0 |

Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan politik mendapat kucuran dana dari APBD Kota Pontianak melalui dana hibah yang pengalokasian dananya dianggarkan pada perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Kewajiban partai politik membuat proposal penerima bantuan keuangan yang harus dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kota Pontianak setiap tahunnya begitu juga dengan alokasi bantuan partai politik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Bantuan Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik dalam mengalokasikan dana dengan pembagian sebesar 40% dipergunakan untuk kesekretariatan partai politik dan sebesar 60% dipergunakan untuk penunjang kegiatan pembinaan politik. Setiap tahunnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat per 31 Januari tahun berikutnya.

Oleh karena itu agar pertanggungjawaban penggunaan tersebut, jajaran pengurus partai politik penerima bantuan keuangan partai politik diberikan bimbingan teknis dan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan proposal bantuan keuangan.

**Tabel Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **JABATAN POKOK** | **KEDUDUKAN**  **DALAM TIM** |
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Pontianak | Pengarah |
| 2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak | Ketua |
| 3. | Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Seksi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak | Sekretaris |
| 5. | Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Pontianak | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 7. | Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 8. | Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak | Anggota |

1. **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)**

Forum koordinasi pimpinan daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian Kelima untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Pembentukan Forkopimda ini bertujuan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang ditingkat [provinsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi), [kabupaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten)/[kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_(Indonesia)" \o "Kota (Indonesia)), dan [kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan). Forkopimda di Kota Pontianak selain di tingkat Kota juga telah ada di tingkat Kecamatan.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam kepengurusan Forkopimda di tingkat Kota Pontianak dan diberikan honorarium berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 663/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinasi Pimpinan Daerah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019-2023 sebagai berikut :

**Tabel Susunan Pengurus Forkopimda Kota Pontianak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan Pokok** | **Jabatan Dalam Tim** | **Honorarium/bulan (Rp)** |
| 1. | Wali Kota Pontianak | Pengarah | 4.000.0000 |
| 2. | Wakil Wali Kota Pontianak | Pengarah | 4.000.000 |
| 3. | Ketua DPRD Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 4. | Sekretaris Daerah Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 5. | Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 6. | Komanda Distrik Militer 1207/BS Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 7. | Komandan Pangkalan Utama TNI AL Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 8. | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 9. | Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak | Anggota | 3.000.000 |
| 10. | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak | Anggota | 3.000.000 |

Rapat Forkopimda dijadwalkan sebanyak 12 kali setiap tahunnya dan merupakan agenda tetap namun ada juga rapat-rapat yang dilaksanakan berdasarkan urgensi dan situasi kondisi di Kota Pontianak.

Berkaitan dengan Forom Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat di 6 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak, dengan unsur dan pengalokasian dananya di masing-masing kecamatan sebagai berikut :

* Camat
* Kapolsek
* Danramil

1. **Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pakem**

Forum kerukunan umat beragama dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umam Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kota Pontianak semenjak berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama ini memasuki tahun ketiga pembentukannya dengan masa 5 Tahun sekali yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak.

Adapun komposisi kepengurusan FKUB sebagai berikut:

**Tabel Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Jabatan dalam FKUB** | **Utusan** |
| 1. | Drs. H. Abdul Syukur , SK | Islam | Ketua |
| 2. | Hadryantus Mentili, S. E | Khatolik | Wakil Ketua 1 |
| 3. | P. Md. Yanto, S. E | Budha | Wakil Ketua 2 |
| 4. | Ir. H. Syafaruddin. AS, M.M | ICMI | Sekretaris |
| 5. | Pendeta Ir. Iwan Luwuk | Kristen | Wakil Sekretaris |
| 6. | Muslimah, S.H | Bimas Islam | Bendahara |
| 7. | Drs. H. Slamet Riyanto, M. Pd | Muhammadiyah | Anggota |
| 8. | Musa, S.Pd.I | Matla’ul Anwar | Anggota |
| 9. | Hadrowi Yahya, S.Pd.I | Lembaga Takmir Mesjid | Anggota |
| 10. | Drs. H. Aswani Syamhoedi | Tarbiyah Islamiyah | Anggota |
| 11. | Hj. Suratminah Suhendro | BKMT | Anggota |
| 12. | Iskandar, S.Ag | Ittihadul Muballighin | Anggota |
| 13. | Yanuarius Buan, S.Pd | Khatolik | Anggota |
| 14. | Pendeta Max Torendek, S.Th | Kristen | Anggota |
| 15. | Pendeta Kurniadi Darmara | Budha | Anggota |
| 16. | I Wayan Sugiono | Hindu | Anggota |
| 17. | Suryanto | Konghucu | Anggota |

Adapun tugas dan Fungsi FKUB tingkat Kota sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
4. Melakukan isasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Tata Cara Pendirian rumah ibadat harus memenuhi :

1. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

* Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3)
* Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
* Rekomendasi tertulis Kepada Badan Departemen Agama Kabupaten / Kota; dan
* Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pemerintahan daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

**Tabel 2.10 Data Jumlah Rumah Ibadah Se-Kota Pontianak**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Rumah Ibadah** | **Tahun** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Islam | 323 | 326 | 342 | 342 | 342 |
| 2. | Khatolik | - | - | - | 30 | 30 |
| 3. | Protestan | 97 | 105 | 107 | 107 | 108 |
| 4. | Budha | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5. | Hindu | - | - | - | - | - |
| 6. | Konghucu | - | - | - | - | 12 |
| **Jumlah** | | **421** | **432** | **450** | **479** | **492** |

**Tabel 2.11 Data Masalah Pembangunan Rumah Ibadah**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Rumah Ibadah** | **Tahun** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Islam | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Khatolik | - | - | - | - | - |
| 3. | Protestan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Budha | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Hindu | - | - | - | - | - |
| 6. | Konghucu | - | - | - | - | 1 |
| **Jumlah** | | **2** | **1** | **1** | **1** | **3** |

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran 5 Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Adapun susunan kepengurusan Tim Pakem Kota Pontianak didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut.

**Tabel 2.12 Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Kota Pontianak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan** | **Kedudukan Dalam Tim** |
| 1. | Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak | Ketua Tim |
| 2. | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 3. | Kasubsi Ideologi Politik, Pertahanan Keamanan, Budaya dan Kemasyarakatan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 4. | Kadis Pendidikan Kota Pontianak | Anggota |
| 5. | Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak | Anggota |
| 6. | Perwakilan Badan Agama Kota Pontianak | Anggota |
| 7. | Ketua Majlis Ulama Kota Pontianak | Anggota |
| 8. | Kasi Intelkam Polres Kota Pontianak | Anggota |
| 9. | Pasi Intelkam Polres Kota Pontianak | Anggota |
| 10. | Perwakilan Badan Intelijen Negara Kota Pontianak | Anggota |
| 11. | Perwakilan FKUB Kota Pontianak | Anggota |
| 12 | Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak | Anggota |
| 13. | Kasi Politik Badan Kesbangpol Kota Pontianak | Anggota |

Rapat tim Pakem ini dilaksanakan pertriwulan selama satu tahun ataupun ada persoalan-persoalan krusial berkaitan dengan dimensi multikultur masyarakat Pontianak.

**Tabel Jumlah Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Se-Kota Pontianak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Aliran Keagamaan** | **Nama Pimpinan Dan/Atau Ketua Organisasi** | **Alamat** |
| 1. | Jamaah Akhmadiyah | M. Al Kautsar ,SE | Jl. Dr. Sutomo Gg.Karya, Sungaibangkong, Pontianak Kota |
| 2. | Aliran Ilmiya | Kasim | Jl. Merdeka Gg. Belibis, Tengah, Pontianak Kota |
| 3. | Ajaran Ilmu Rahasia Tuhan | Muhammad Bin Kasim Alias Atong | Jl. Zainuddin No. 41, Tengah, Pontianak Kota |
| 4. | Aliran Salafy | Ustad Anas | Jl. Apel, Sungaijawi Luar, Pontianak Barat |
| 5. | Thoriqat Haq Naqsabandiyah | Akhmad M. Ali | Jl. Sungai Landak, Tanjung Hilir, Pontianak Timur |
| 6. | Perkumpulan Aliran Saksi Yehova | M. Sembiring | Jl. Untung Surapati, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan |
| 7. | Hariman (Haritsan) Aminan Lil Islam (Eks HTI) | M. Kurniawan | Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara |
| 8. | Paham Syiah | Sy. M. Herman | Jl. Tanjung Raya 2, Saigon, Pontianak Timur |
| 9. | Jamaah Tabligh | H. Busri Endang | Masjid Quba  Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara |
| 10. | Lembaga Dakwah Islam Indonesia | Junaidi | Jl. Putri Candramidi, Sungaibangkong, Pontianak Barat |
| 11. | Jamaah Jam’iyyatul Islamiyah | M. Arif | Surau Raudhatul Jannah  Jl. Parit Pangeran Siantan Hulu, Pontianak Utara |

1. **Organisasi Kemasyarakatan**

Dasar hukum pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Pengertian organisasi kemasyarakatan adalah [organisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi) yang didirikan dan dibentuk oleh [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang berdasarkan Pancasila.

Syarat-syarat mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan diantaranya ;

**Pendirian Ormas**

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

 Ormas dapat berbentuk:

a. badan hukum; atau

b. tidak berbadan hukum.

Ormas juga dapat:

a. berbasis anggota; atau

b. tidak berbasis anggota.

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk:

a. perkumpulan; atau

b. yayasan.

Ormas Badan Hukum Perkumpulan

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:

* 1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  2. Program kerja;
  3. Sumber pendanaan;
  4. Surat keterangan domisili;
  5. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ormas Badan Hukum Yayasan

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

**Cara Pendaftaran Ormas**

Kami kurang mengerti arti dari melegalkan organisasi kepemudaan yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi melegalkan di sini berarti membuat agar organisasi tersebut terdaftar.

Berbadan Hukum

Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Tidak Berbadan Hukum

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

1. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
2. program kerja;
3. susunan pengurus;
4. surat keterangan domisili;
5. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
6. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
7. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:

a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;

b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau

c. Bupati/Wali Kota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota

Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota dalam wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Ormas dilakukan oleh camat atau sebutan lain. Pendataan Ormas meliputi:

a. Nama dan alamat organisasi;

b. Nama pendiri;

c. Tujuan dan kegiatan; dan

d. Susunan pengurus.

Jika organisasi kepemudaan yang Anda maksud merupakan ormas yang berbadan hukum, maka ormas berbadan hukum tersebut dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Sebaliknya, jika organisasi kepemudan tersebut merupakan ormas yang tidak berbadan hukum, maka pendaftarannya dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh:

a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;

b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau

c. Bupati/Wali Kota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

**Tabel 2.14 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Se-Kota Pontianak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jumlah Ormas** | **Klasifikasi** | |
| **Tahun** | **Terdaftar** | **Terdata** |
| 1. | 2016 | 99 | 30 |
| 2. | 2017 | 129 | 15 |
| 3. | 2018 | 139 | 10 |
| 4. | 2019 | 147 | 18 |
| 5. | 2020 | 158 | 83 |
| 6. | 2021 | 75 | 99 |

1. **Narkotika dan P4GN**

Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya diperlukan dasar hokum sebagai acuan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotka dan Prekursor Narkotika.

Untuk mendukung pemberantasan narkoba dan P4GN yang berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Narkoba dan Surat Edaran Nomor 10/KESBANGPOL/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotka dan Prekursor Narkotika.

**Tabel 2.15 Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Kota Pontianak Periode Tahun 2019-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Jabatan** | **Kedudukan dalam Tim** |
| 1. | Wali Kota Pontianak | Pengarah |
| 2. | Wakil Wali Kota Pontianak | Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Pontianak | Penanggungjawab |
| 4. | Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak | Ketua |
| 5. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak | Sekretaris |
| 6. | Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pontianak | Anggota |
| 7. | Kepala Satuan Narkoba Kota Pontianak | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 10. | Kepala Bidang Budaya Badan Pembangunan Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 11. | Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Kota Pontianak | Anggota |
| 12. | Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak | Anggota |
| 13. | Kepala Bidang Pemberdayaan Pendidikan Formal Dan Informal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak | Anggota |
| 14. | Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak | Anggota |
| 15. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak | Anggota |
| 16. | Camat Se Kota Pontianak | Anggota |
| 17. | Ketua Pokja II PKK Kota Pontianak | Anggota |
| 18. | Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak | Anggota |
| 19. | Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak | Anggota |
| 20. | Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Nasi onal Narkotika Kota Pontianak | Anggota |
| 21. | Kepala Seksi Pemberantasan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak | Anggota |
| 22. | Lurah Se Kota Pontianak | Anggota |
| 23. | Ketua Forum Anak Kota Pontianak | Anggota |
| 24. | Pengadministrasian Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak | Anggota |
| 25. | Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak | Anggota |

* 1. **Bidang Kesatuan Bangsa**
     1. **Wawasan Kebangsaan dan ideologi Pancasila**

Salah satu wujud mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penanaman nilai-nilai Idiologi Pancasila kepada Masyarakat di Kota Pontianak di lakukan melalui kegiatan-kegiatan isasi Wawasan Kebangsaan, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara serta Pemantapan dan Pemahaman masyarakat melalui forum-forum diantaranya forum Kewaspadaan Dini, Forum Pemebauran Kebangsaan dan Tim Kewaspadaann Dini Daerah.

Pemahaman akan wawasan kebangsaan dan Pacasila masih sangat di butuhkan mengingat Indonesia dengan Multikompleks persoalan luas wilayah, karakterbangsa, Heterogenitas, Negara Kepulauan, Sumber Daya Alam yang besar disatu sisi memberikan nilai positif namun disisi lain apabila tidak dirawat akan menjadi potensi konflik.

Begitu halnya juga Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi, Heterogenitas penduduk berbatas dengan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, luas wilayah yang sangat kecil serta traumatis akibat konflik rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Untuk itu dibentuk beberapa forum-forum diantaranya:

**Tabel 2.17 Tim Terpadu Tingkat Kota Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/jabatan** | **Kedudukan dalam Tim** |
| 1. | Wali Kota Pontianak | Ketua |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Pontianak | Wakil Ketua I |
| 3. | Kapolreta Pontianak Kota | Wakil Ketua II |
| 4. | Dandim 1207 Pontianak | Wakil Keyua II |
| 5. | Kaban Kesbangpol Kota Pontianak | Sekretaris |
| 6. | Kabag Ops Polresta Kota Pontianak | Wakil Sekretaris I |
| 7. | Pasi Ops Kodim 1207 Pontianak | Wakil Sekretaris II |
| 8. | Danlantamal Pontianak | Anggota |
| 9. | BIN Pos Daerah | Anggota |
| 10. | Kepala Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Pontianak | Anggota |
| 11. | Kaban Penanggulanagn Bencana Kota Pontianak | Anggota |
| 12. | Kaban Keuangan Daerah Kota Pontianak | Anggota |
| 13. | Kadis Kota Pontianak | Anggota |
| 14. | Kadisdukcapil Kota Pontianak | Anggota |
| 15. | Kadis Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak | Anggota |
| 16. | Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak | Anggota |
| 17. | Kadis Perhubngan Kota Pontianak | Anggota |
| 18. | Kadis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak | Anggota |
| 19. | Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak | Anggota |
| 20. | Kakan Kemenag Kota Pontianak | Anggota |
| 21. | PD Terkait | Anggota |

**Tabel 2.18 Tim Kewaspadaan Dini Kota Pontianak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan Pokok** | **Jabatan**  **Dalam Tim** |
|  | TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH |  |
|  | Wali Kota Pontianak | Ketua |
|  | Wakil Wali Kota Pontianak | Wakil Ketua |
|  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak | Sekretaris |
|  | Badan Intelijen Negara Pos Kota Pontianak | Anggota |
|  | Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Kota Pontianak | Anggota |
|  | Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1207 Pontianak | Anggota |
|  | Dantim Intel Lantamal XII Kota Pontianak | Anggota |
|  | Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Pontianak | Anggota |
|  | Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Badan Imigrasi Kelas I Pontianak | Anggota |
|  | Kepala Bidang Pelayanan dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak | Anggota |
|  | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Kota Badan Satuan Pamong Praja Pontianak | Anggota |
|  | Ketua Badan Koordinator Komunikasi Wilayah KODIM 1207/BS | Anggota |
|  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak | Anggota |

**Tabel 2.19 Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Kota Pontianak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Institusi / Kelembagaan** | **Jabatan Dalam Pengurus** |
| 1. | H, Muhammad Sani, SH | Tokoh Masyarakat | Ketua |
| 2. | H. Nanang Setiabudi, S,Sos | Tokoh Masyarakat | Wakil Ketua merangkap anggota |
| 3. | H. Syafrudin. Ibrahim | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 4. | H, Arif Rahman ,SH | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 5. | Ust. H. Helmi Amin | Tokoh Agama | Anggota |
| 6. | Pendeta Ir. Iwan Luwuk | Tokoh Agama | Anggota |
| 7. | Yanuarius Buan, S.Pd | Tokoh Agama | Anggota |
| 8. | Ateng Tanjaya | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 9. | Agusman | Tokoh Pemuda | Anggota |
| 10 | Rohim | Kepolisian | Anggota |

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan aspek kemasyarakatan rentan menimbulkan dan merespon kejadian kejadian dari kebijakan Pemerintah Pusat Dalam bentuk Aksi Unjuk Rasa maupun demontrasi yang masih dalam koridor kondusif.

**Tabel 2.20 Jumlah Aksi Unjuk Rasa/Demontrasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Demontrasi** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 |

* + 1. **Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara**

Indonesia di era revolusi industry 4.0 saat ini menghadapi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sangat cepat dan canggih, cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. AGHT yang dihadapi tidak hanya menyasar pada satu dimensi, melainkan multidimensi yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai: Nilai-nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi kebangsaan; Integritas moral, etika, dan supremasi hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesamaan persepsi atas lima substansi tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu dibutuhkan aksi nasional bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara. Komponen tersebut meliputi unsur-unsur pemerintah, pendidikan, pelaku usaha, komponen masyarakat, dan media. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No.7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, salah satu aksi yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah melaksanakan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara melalui metode pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka standardisasi pelaksanaan internalisasi tersebut diperlukan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.

**Tabel Pelaksanaaan Pelatihan Bela Negara Kota Pontianak**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Perserta Bela Negara** | | | | | | **Lokasi** |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Unit Pelatiahan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat  Jl. Aburahmman Saleh |
| 1. | 60 | 60 | 90 | 80 | 60 | 60 |

Di bawah ini adalah tabel pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Presentase Penyelesaian Konflik |  | 100 % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |  | 100% | 100% | 100% | - | - |

Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran Pada Tahun  Ke | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | Rata-Rata  Pertumbuhan | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan | 223.959.000.000 | 971.750.000 |  | 582.625.000 | 412.512.000 | 140.933.000 | 787.243.300 |  | 558.242.700 | 411.740.850 | 62.93% | 81.02% |  | 95.82% | 99.28% | 438.169.200 | 379.631.970 |
| Program Pembinaan Sosial Politik | 622.723.500. | 50.764.000 |  | 425.900.000 | 662.177.900 | 331.928.500 | 32.645.000 |  | 409.345.100. | 660.734.600 | 53.31% | 64.31% |  | 96.12% | 99.79% | 352.313.080 | 286.930.640 |

* 1. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan melaksanankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistim politik yang demokratis.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya menunjukan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain :

1. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target.
2. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target yang mesti dicapai.
3. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu :

* Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol;
* Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi
* Kualitas sumber daya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.

Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pencapaian target.

**TANTANGAN:**

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

* Kondisi geografis sebagai Ibukota Provinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.
* Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan terorisme.
* Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.
* Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.
* Sebagai daerah tujuan wisata domestik dan manca negara berpotensi terjadinya peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
* Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.
* Kurangnya koordinasi antara instansi.

**PELUANG :**

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

* Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
* Meningkatnya kinerja demokrasi di Kota Pontianak melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.
* Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.
* Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain :

* Pendanaan program dan kegiatan yang memadai.
* Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam meguasai IPTEK melalui pendidikan dan pelatihan.
* Peningkatan pengawasan terhadap orang asing.
* Peningkatan pengendalian kerukunan, pencegahan/penghentian/ pemulihan konflik .

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

* 1. Permasalahan Pelayanan

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Pontinak masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak.

* 1. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

* 1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  2. Adanya isu kepercayaan/aliran yang menyimpang sehingga perlu pembinaan Ketahanan, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan ekonomi;
  3. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik;
  4. Narkotika dan P4GN.

1. **Masalah Yang Bersifat Internal**
2. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;
3. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
4. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia.
5. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.
7. **Masalah Yang Bersifat Eksternal**
   1. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
   2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik di masyarakat;
   3. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
   4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
   5. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
   6. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;
   7. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
   8. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol
   9. Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Badan Kesbangpol Kota Pontianak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Isu Strategis** | | |
| **Dinamika Internasional** | **Dinamika** **Nasional** | **Dinamika Regional/Lokal**  **Lain-lain** |
| 1 | Globalisasi | Globalisasi | Perkembangan teknologi |
| 2 | Kemiskinan | Pengangguran meningkat | Pengangguran meningkat |
| 3 | Agama | Kepercayaan/aliran yang menyimpang | kepercayaan/aliran yang menyimpang yang tidak ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah sering menjadi sumber konflik |
| 4 | Demokratisasi | Rendahnya pemahaman  kesadaran dan partisipasi politik | Rendahnya pemahaman  kesadaran dan partisipasi politik |
| 5. | Narkoba | Maraknya peredaran narkoba | Belum tertangani narkoba secara masif |

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. Tujuan dan Sasaran

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024 - 2026 maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan.

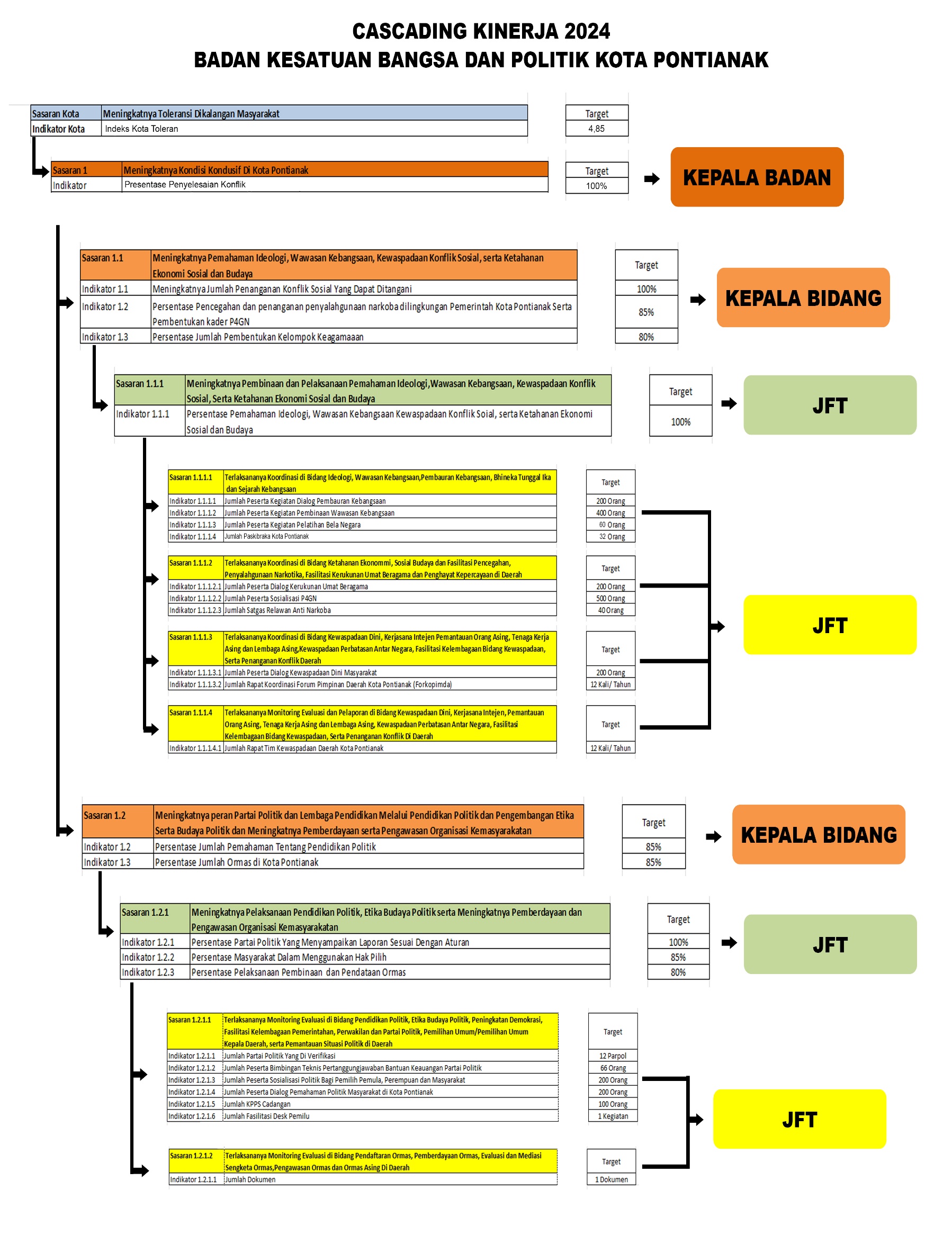
Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk TUJUAN sebagai berikut :

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan

tertib

**Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator**  **Tujuan /Sasaran** | **Formula** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat | Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak | Persentase penyelesaian konflik | % = (Jumlah Konflik yang diselesaikan / Jumlah Konflik ) x 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* 1. *****Cascading* Kinerja

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik selama periode 2024-2026. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategik jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti horizon waktu.

Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik Kota Pontianak periode 2024 – 2026.

**STRATEGI**

1. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
2. Meningkatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat
3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

**ARAH KEBIJAKAN**

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan seminar wawasan kebangsaan dan pelatihan bela negara.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik , terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik .
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

**Tabel 5.1** **Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Kesbangpol**

**Kota Pontianak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan RPJMD : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** |  | **Strategi** |  | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatknys Toleransi dikalangan Masyarakat | Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak | 1. | Meningkatka Peran Partai politik dan lembanga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etikaserta budaya politik | 1. | Merumuskan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik di daerah |
| 2. | Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat | 2. | Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui kegiatan seminar wawasan kebangsaan dan pelatihan bela negara |
| 3. | Memberdayakan dan Mengawasi organisasi kemasyarakatan | 3. | Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan |
| 4. | Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi dan budaya | 4. | Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya |
| 5. | Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | 5. | Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik , terorisme dan radikalisme di daerah |
| 6. | Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6. | Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel VI.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
| Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Meningkatnya Toleransi Di kalangan Masyarakat |  |  |  | Indeks Kota Toleran | 4,50 | 4,85 | 33.991.116.000 | 4,95 | 8.413.917.000 | 5 | 8.437.217.000 | 5 | 8.437.217.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  | Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak |  |  | Persentase penyelesaian konflik | 100% | 100% | 33.991.116.000 | 100% | 8.413.917.000 | 100% | 8.437.217.000 | 100% | 8.437.217.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 2.2.3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase peningkatan pemahaman politik | 85% | 90% | 28.534.089.000 | 90% | 3.434.089.000 | 90% | 3.434.089.000 | 90% | 3.434.089.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.534.089.000 | 1 Dokumen | 3.434.089.000 | 1 Dokumen | 3.434.089.000 | 1 Dokumen | 3.434.089.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Parpol Yang diverifikasi dan menerima bantuan berdasarkan perolehan suara | 12 | NA | 3.314.590.000 | NA | 3.314.590.000 | NA | 3.314.590.000 | NA | 3.314.590.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di  Daerah | Jumlah Peserta Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Masyarakat | 1066 orang | 1066 orang | 25.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
| Jumlah KPPS Cadangan | 0 orang | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
| Jumlah Fasilitasi Desk pemilu | 0 Kegiatan | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 119.499.000 | 1 Laporan | 119.499.000 | 1 Laporan | 119.499.000 | 1 Laporan | 119.499.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 2.2.4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase pemberdayaan ormas | 85% | 85% | 420.000.000 | 85% | 420.000.000 | 85% | 420.000.000 | 85% | 420.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.4.2 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 420.000.000 | 1 Dokumen | 420.000.000 | 1 Dokumen | 420.000.000 | 1 Dokumen | 420.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen | 400.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas  Asing di Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000 | 1 Laporan | 20.000.000 | 1 Laporan | 20.000.000 | 1 Laporan | 20.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 2.2.2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan | 90% | 90% | 919.000.000 | 90% | 819.000.000 | 90% | 819.000.000 | 90% | 819.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan  Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan  Karakter Kebangsaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 919.000.000 | 1 Dokumen | 819.000.000 | 1 Dokumen | 819.000.000 | 1 Dokumen | 819.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.02.2.01.4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah  Kebangsaan | 700 orang | 700 orang | 319.000.000 | 700 orang | 319.000.000 | 700 orang | 319.000.000 | 700 orang | 319.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Paskibraka | 32 orang | 32 orang | 600.000.000 | 32 orang | 500.000.000 | 32 orang | 500.000.000 | 32 orang | 500.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 2.2.5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 90% | 90% | 100.000.000 | 90% | 100.000.000 | 90% | 100.000.000 | 90% | 100.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.5.2 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100 orang | 100 orang | 100.000.000 | 100 orang | 100.000.000 | 100 orang | 100.000.000 | 100 orang | 100.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 2.2.6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | 100% | 100% | 728.000.000 | 100% | 728.000.000 | 100% | 728.000.000 | 100% | 728.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.6.2 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan  Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 728.000.000 | 1 Dokumen | 728.000.000 | 1 Dokumen | 728.000.000 | 1 Dokumen | 728.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 150 orang | 150 orang | 547.000.000 | 150 orang | 547.000.000 | 150 orang | 547.000.000 | 150 orang | 547.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 181.000.000 | 1 Laporan | 181.000.000 | 1 Laporan | 181.000.000 | 1 Laporan | 181.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat | 71.07 | 72 | 3.290.027.000 | 72,5 | 2.912.828.000 | 73 | 2.936.128.000 | 73 | 2.936.128.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  |  |  | Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat | 93.2 | 94.5 |  | 95 |  | 95.5 |  | 95.5 |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 5.000.000 | 8 Dokumen | 5.000.000 | 8 Dokumen | 5.000.000 | 8 Dokumen | 5.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 7 Laporan | 5.000.000 | 7 Laporan | 5.000.000 | 7 Laporan | 5.000.000 | 7 Laporan | 5.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 2.376.527.000 | 100% | 2.399.327.000 | 100% | 3.422.627.000 | 100% | 3.422.627.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang | 22 Orang | 2.076.527.000 | 22 Orang | 2.099.327.000 | 22 Orang | 2.122.627.000 | 22 Orang | 2.122.627.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 300.000.000 | 6 Dokumen | 300.000.000 | 6 Dokumen | 300.000.000 | 6 Dokumen | 300.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2.1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 32 Unit | 32 Unit | 35.000.000 | 32 Unit | 35.000.000 | 32 Unit | 35.000.000 | 32 Unit | 35.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2.1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 100% | 217.500.000 | 100% | 217.501.000 | 100% | 217.501.000 | 100% | 217.501.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000 | 1 Paket | 3.001.000 | 1 Paket | 3.001.000 | 1 Paket | 3.001.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 30.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik  Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000 | 1 Paket | 50.000.000 | 1 Paket | 50.000.000 | 1 Paket | 50.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 30.000.000 | 1 Paket | 30.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.500.000 | 12 Dokumen | 4.500.000 | 12 Dokumen | 4.500.000 | 12 Dokumen | 4.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan | 100.000.000 | 7 Laporan | 100.000.000 | 7 Laporan | 100.000.000 | 7 Laporan | 100.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2.1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 460.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 1 Unit | 400.000.000 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 60.000.000 | 2 Unit | 60.000.000 | 2 Unit | 60.000.000 | 2 Unit | 60.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2.1 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 170.000.000 | 100% | 170.000.000 | 100% | 170.000.000 | 100% | 170.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 2 Laporan | 35.000.000 | 2 Laporan | 35.000.000 | 2 Laporan | 35.000.000 | 2 Laporan | 35.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | 135.000.000 | 4 Laporan | 135.000.000 | 4 Laporan | 135.000.000 | 4 Laporan | 135.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.1.1.2.1 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 21.000.000 | 100% | 21.000.000 | 100% | 21.000.000 | 100% | 21.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  | |
|  |  | .01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 2 Unit | 6.000.000 | 2 Unit | 6.000.000 | 2 Unit | 6.000.000 | 2 Unit | 6.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  | 8.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin  Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | 15.000.000 | 2 Unit | 15.000.000 | 2 Unit | 15.000.000 | 2 Unit | 15.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kota Pontianak |
|  |  |  |  |  | JUMLAH |  | 33.991.116.000 |  | 8.413.917 |  | 8.437.217.000 |  | 8.437.217.000 |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak juga membuat inovasi berupa aplikasi yang diberi nama SITERBANG, aplikasi ini dibuat untuk membantu mempercepat pelayanan di Badan Kesbangpol Kota Pontianak. Adapun pelayanan yang bisa di gunakan di dalam aplikasi SITERBANG adalah pembuatan surat izin penelitian, pembuatan SKT Organisasi Masyarakat, Pembuatan Rekomendasi Reklame Non Komersial, Pembuatan Surat Keterangan Bersih Diri.

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD** |
| **2023**  **Satuan** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **I.** | **Presentase Penyelesaian Konflik** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu dokumen resmi daerah yang di susun untuk di jadikan pedoman bagi kepala Perangkat daerah dalam melakukan perencanaan di bidangnya. Untuk mencapai target sasaran yang di rencanakan dalam Rencana Strategis maka di perlukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah sebagai Landasan Penyusunan RKA Perangkat daerah. Demi Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 -2026, maka Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak perlu melakukan pengendalian evaluasi dan kebijakan, pelaksanaan serta hasil kinerja Badan.

Namun Demikian mengingat permasalahan di Kota Pontianak sangat kompleks maka tidak akan di selesaikan sendiri oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara unit kerja di Kota Pontianak .

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

**Lampiran 1. Bagan Sinergitas Perencanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah antara RPJMD dan Renstra PD Kesbangpol Tahun 2024-2026**

